



**PERAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN LAPANGAN  
KERJA MELALUI INVESTASI MOBIL CEPU LIMITED TAHUN 2009-2011**

**Siti Endang Lestari, Drs.Turtiantoro, Msi, Lusia Astrika S.IP, M.si**

**D2B 009 013**

**([thary.yazeed@yahoo.com](mailto:thary.yazeed@yahoo.com))**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro**

**Jln. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, 50239.**

**Abstraksi:**

Peran pemerintah daerah dan investasi swasta sangat penting untuk meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan dan pemangku kebijakan perlu melakukan kerjasama dengan investasi swasta yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah dan investasi swasta dalam meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan investasi swasta dalam meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis diskriptif. Adapun teknik untuk menguji kualitas data menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian membuktikan bahwa pemerintah daerah dan investasi swasta dalam upaya meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat dilaksanakan melalui beberapa peran, dan untuk mendukung peran tersebut terdapat pula langkah dan strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah dan investasi swasta untuk mencapai tujuan meningkatkan lapangan kerja.

**Abstract:**

The role of local government and private investment is substantial to increase an employment to society. Local government as authority and policy maker needs to have partnership with private investment that aims to create a new employment to society. Partnership in the implementation of local government and private company and also the society is involved, as of its partnership can be either felt by all stake holder or profit. In their role to increase an employment get some obstacles to be faced by local government and private investment. Starting from the the number of employment and

employer imbalance and incompatibility of jobs applicant. The aims of the research are to be aware the role of local government and private investment and to identify the obstacles by local government and private investment for increasing an employment to society. The type of research is descriptive research. The method of research is qualitative research. Informants-making technique uses purposive sampling. The techniques of collecting data are interviews, documentations, literatures and observations. The analytical technique uses descriptive analytical. And, the technique to verify the qualities of data uses the triangulation of data. The result of the research verifies that local government and private investment to increase an employment to society are implemented through some roles. To support its roles occurs some steps and strategies are used by local government and private investment to reach the aims. The lack of funds and resources are the obstacles which is faced by local government. Besides that, the imbalance of jobs applicant and employment and incompatibility of jobs applicant are the obstacles of private investment.

## **PENDAHULUAN**

Era reformasi saat ini telah memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Keadaan tersebut diwujudkan dengan penerapan kebijakan otonomi daerah saat ini. Dengan adanya otonomi daerah, peran dari pemerintah daerah menjadi sangat penting. Karena pelayanan jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat sangat dibutuhkan, semakin tingginya pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam melaksanakan peranannya sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Pengelolaan dan pelaksanaan peran dari pemerintah daerah didasarkan pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 bahwa pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian peranan dari pemerintah daerah sangat penting, salah satu peran dari pemerintah daerah yaitu menjalin kerja sama dengan investasi swasta. Hal ini dipandang dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan melalui penciptaan lapangan kerja baru.

Melalui PMA tersebut, diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja yang disertai dengan peningkatan keahlian dan ketrampilan. Pada dasarnya penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) diatur dalam Undang-

Undang No.25 Tahun 2007 pasal 1 dan 3. Dan untuk dapat menarik para investor swasta agar bersedia menanamkan modalnya, maka pemerintah daerah harus mampu menciptakan iklim yang kondusif dalam dunia usaha.

Kabupaten Blora merupakan daerah penghasil minyak dan gas bumi, lebih tepatnya dibagian Blok Cepu. Daerah ini termasuk salah satu penghasil minyak dan gas bumi tertua di dunia dengan dimulainya produksi pada tahun 1887 dan lebih dari 30 ladang minyak ditemukan. Produksi kumulatif sampai sekarang telah melebihi 220 juta barrels. Pengolahan minyak di Blok Cepu sudah dimulai sejak perang dunia ke II, dan Investasi swasta yang mengelolanya dari tahun ke tahun mengalami pergantian. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi seperti saat ini mengakibatkan ladang minyak yang dulunya tidak banyak diketahui namun sekarang banyak bermunculan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut banyak menarik para investor untuk dapat menanamkan modalnya di Kabupaten Blora.

Investasi swasta yang sekarang menguasai minyak dan gas bumi di Blok cepu yaitu Mobil Cepu Ltd. Mobil Cepu Ltd adalah anak cabang dari perusahaan ExxonMobil yang berasal dari Amerika. Mobil Cepu Ltd berfokus memproduksi minyak dan gas bumi. Mobil Cepu Ltd juga memegang 45 persen saham kepemilikan di Blok Cepu dan bertindak sebagai Operator dari KKS Cepu atas nama para Kontraktor. ExxonMobil melalui Mobil Cepu Ltd (MCL) mulai melakukan kerja sama sekitar tahun 2000 tetapi Kontrak Kerja Sama (KKS) Cepu ditanda-tangani pada 17 September 2005 dan mencakup area kontrak Cepu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mobil Cepu Ltd (MCL) dan Amploex Cepu PTE LTD, keduanya anak perusahaan ExxonMobil Corporation, PT Pertamina EP Cepu serta empat badan usaha milik pemerintah daerah ditunjuk dan bertindak sebagai Kontraktor pada KKS Cepu. Dan KKS Cepu ini berlaku hingga 2035.

Dengan adanya sumber minyak dan gas bumi di Blok Cepu Kabupaten Blora dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah setempat untuk menjalin kerjasama dengan investasi swasta yaitu Mobil Cepu Ltd (MCL). Pentingnya kerjasama dengan investasi swasta yaitu mengingat kapasitas fiskal pemerintah daerah Kabupaten Blora yang memiliki keterbatasan sehingga sulit untuk selalu dijadikan sebagai sumber utama pertumbuhan. Selain itu, investasi dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan dan dapat mengurangi pengangguran yang terdapat di Kabupaten Blora. Investasi swasta juga memiliki peran dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara optimal dalam kegiatan produksi sehingga diharapkan banyak membuka lapangan pekerjaan yang baru sehingga banyak menyerap tenaga kerja.

Hal ini dipandang sebagai kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah kabupaten Blora untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan yang dimaksud disini yaitu berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Blora dan Mobil Cepu Ltd

(MCL) sebagai investasi swasta untuk membuka dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Yang diselenggarakan melalui pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Karena dengan tersedianya lapangan kerja yang banyak dinilai dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Blora.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dimana yang menjadi subyek penelitian adalah kepala bidang pentatrans Dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosial Kabupaten Blora, kepala direksi Mobil Cepu Ltd yaitu Rexy Mawardijaya dan masyarakat. Situs penelitian berkaitan dengan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Adapun tempat yang menjadi penelitian yaitu Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Blora, Kantor Mobil Cepu Ltd (MCL) dan Wilayah di sekitar Blok Cepu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua sumber data yakni Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam dengan informan. Informan pertama dalam penelitian ini adalah Kepala bidang Pentatrans Dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosial Kabupaten Blora, kepala direksi Mobil Cepu Ltd dan masyarakat. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung melalui laporan-laporan, observasi, studi literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data kedua dalam penelitian ini adalah arsip yang akan diperoleh dari pemerintah daerah dan Mobil Cepu Ltd, serta tulisan atau kajian-kajian yang terkait dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara dengan informan sebagai teknik utamanya, kemudian peneliti juga menggunakan teknik observasi yang artinya bahwa peneliti melakukan pengamatan langsung pada tempat atau objek penelitian. sebagai penunjang, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka untuk mendapat data-data tertulis yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Sedangkan untuk teknik pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif model interaktif sebagaimana yang diajukan oleh Miles dan Huberman yaitu Reduksi data yang dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sejalan

pelaksanaan penelitian berlangsung, kemudian diikuti dengan Penyajian data yaitu pemaparan data yang telah diperoleh, sebagai persiapan untuk melakukan analisis dan kemudian pada akhirnya melakukan penyimpulan data. Penarikan kesimpulan atau verifikasi pada tahap ini dimaknai sebagai penarikan arti dari data yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang akan dibuat. Beberapa cara yang dilakukan dalam tahap ini adalah mencari data yang dikumpulkan, kemudian mencari pola, tema hubungan, permasalahan hal-hal yang sering muncul dan sebagainya. Adapun teknik untuk menguji kualitas data menggunakan triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah dipahami secara benar oleh peneliti berdasarkan apa yang dimaksudkan informan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Peran Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Lapangan Kerja Masyarakat**

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Mengingat tantangan yang dihadapi oleh daerah adalah penyiapan lapangan kerja karena pertambahan angkatan kerja yang begitu pesat. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Peranan pemerintah daerah dirasakan sangat perlu untuk menyediakan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat dengan tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang rendah. Sebagai pusat pelayanan masyarakat pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan pelayanannya terutama dalam hal membuka dan memberikan informasi mengenai kesempatan kerja yang terdapat di Kabupaten Blora. Sehingga dengan adanya informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang sedang mencari pekerjaan untuk dapat melamar perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tersebut. Dengan banyaknya kesempatan kerja yang tersedia sehingga dapat mengurangi pengangguran yang terdapat di Kabupaten Blora.

Untuk mewujudkan itu semua peran dari pemerintah daerah Kabupaten Blora sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, kaitannya dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan lapangan kerja masyarakat Kabupaten Blora dilaksanakan melalui beberapa peranan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kursus-kursus ketrampilan bagi masyarakat atau pencari kerja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kursus-kursus yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang ditujukan kepada para pencari kerja diharapkan dapat membantu para pencari kerja. Dalam pelaksanaan kursus ini biasanya pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi atau lembaga yang bersangkutan dengan pelaksanaan kursus ketrampilan tersebut. Misalnya: Balai Latihan Kerja (BLK).

- b. Mendirikan berbagai macam usaha milik daerah (Perusda)

Peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti memberikan fasilitas dan mempermudah pengusaha yang terdapat di daerah Kabupaten Blora untuk membuka lapangan kerja baru, memajukan produksi kerajinan tangan, memberi kepercayaan pada hasil produksi asli daerah, serta menggalakkan penjualan produksi usaha asli daerah sendiri agar usaha asli daerah dapat dimanfaatkan untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakatnya.

c. Membantu dan mendorong kewirausahaan.

Peran pemerintah daerah disini berupaya selalu memberikan dukungan kepada para wirausaha untuk terus mengembangkan usahanya dan diharapkan dapat menambah jenis usahanya sehingga dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di Kabupaten Blora.

d. Melakukan perpindahan penduduk antar pulau (Transmigrasi).

Tingkat pencari kerja yang terdapat di Kabupaten Blora dapat sedikit teratasi apabila masyarakat bersedia untuk mengikuti program transmigrasi. Apalagi kalau kita melihat masyarakat yang tinggal di daerah kumuh. Daerah di luar Pulau Jawa sangat cocok dijadikan wilayah transmigrasi karena lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Baik peluang berwiraswasta maupun pekerjaan di perusahaan lebih terbuka lebar. Apalagi bagi masyarakat yang mempunyai pendidikan tinggi, tidaklah terlalu sulit untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang besar.

e. Menyediakan informasi dan menyebarkan informasi lowongan pekerjaan.

Masalah pengangguran dapat muncul karena orang tidak tahu perusahaan apa saja yang membuka lowongan kerja, atau perusahaan seperti apa yang cocok dengan keterampilan yang dimiliki. Masalah tersebut adalah persoalan informasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu diadakan sistem informasi yang memudahkan orang mencari pekerjaan yang cocok.

f. Menyelenggarakan pelatihan ketrampilan peningkatan produktifitas masyarakat di perdesaan.

Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan peningkatan produktifitas masyarakat di perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bertujuan agar masyarakat perdesaan di Kabupaten Blora banyak yang memiliki ketrampilan sehingga dapat menciptakan industri rumah tangga yang nantinya diharapkan dapat mengurangi pengangguran yang terdapat didesa-desa dan dapat menciptakan lapangan kerja baru melalui industri rumah tangga tersebut.

Pemerintah daerah Kabupaten Blora dalam melaksanakannya perannya untuk meningkatkan lapangan kerja dilakukan melalui berbagai program-program kemasyarakatan yang sifatnya dapat memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat, misalnya: melaksanakan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) yang dijalankan dalam bentuk kegiatan Padat Karya Produktif, Padat Karya Infrastruktur, dan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berguna untuk mendidik masyarakat agar dapat berwirausaha sendiri. Sedangkan untuk mendukung peranan

pemerintah daerah Kabupaten Bloro untuk meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat dibutuhkan langkah dan strategi. Pemerintah daerah Kabupaten Bloro dalam menggunakan langkah dan strategi untuk meningkatkan lapangan kerja masyarakat dilakukan dengan melalui beberapa kebijakan, yaitu:

- a. Pelaksanaan kebijakan makro, sektoran dan regional untuk mendukung kesempatan kerja masyarakat

Dalam upaya penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan diperlukan dukungan pertumbuhan ekonomi yang lebih berorientasi pada kepentingan pekerja dan perluasan lapangan kerja melalui program-program penciptaan lapangan kerja dengan didukung penyebaran informasi dan perencanaan tenaga kerja.

- b. Upaya pelaksanaan kebijakan penciptaan lapangan kerja langsung

Kebijakan ini diharapkan dapat mawadahi kepentingan masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja dalam era pembangunan saat ini. Manusia sebagai tenaga kerja yang semula dipandang sebagai objek pembangunan berkiprah lebih luas menjadi pelaksana, pemanfaat dan penentu pembangunan. Pandangan baru yang melihat tenaga kerja sebagai sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kemampuan merubah hubungan industrial antara pemilik modal (pengusaha) dengan pekerja kearah kemitraan.

- c. Mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para pekerja.

Upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja sangat dibutuhkan. Kebijaksanaan tersebut diupayakan melalui peningkatan efisiensi iklim usaha yang dinamis yang didukung oleh perkembangan perekonomian secara menyeluruh.

Selain beberapa peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat yang telah disebutkan diatas. Pemerintah daerah Kabupaten Bloro juga melaksanakan kerjasama dengan Mobil Cepu Ltd sebagai investasi swasta untuk dapat menanamkan modalnya di Kabupaten Bloro. Kerjasama tersebut bertujuan untuk dapat menciptakan lapangan kerja baru dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Bloro. Pemerintah daerah selaku pemegang kebijakan dalam mengambil keputusan harus melibatkan swasta dan masyarakat agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bloro dalam melakukan kerjasama dengan investasi swasta agar bersedia menanamkan modalnya di Kabupaten Bloro yaitu dilakukan dengan cara memberikan kemudahan perijinan kepada investasi swasta untuk mendirikan usahanya di Kabupaten Bloro, menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh investasi swasta dan melaksanakan pengawasan terhadap investasi swasta selama menjalankan usahanya di Kabupaten Bloro.

Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat menciptakan banyak peluang kerja untuk masyarakat di kabupaten Bloro sehingga pengangguran yang

terdapat di Kabupaten Blora dapat berkurang serta perekonomian daerah Blora dapat lebih berkembang. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora akan meningkat pula.

## **2. Peran Investasi Swasta Untuk Meningkatkan Lapangan Kerja Masyarakat**

Investasi swasta memiliki peranan penting dalam penciptaan kesempatan kerja. Semakin meningkat jumlah investasi maka semakin luas kesempatan kerja yang tersedia untuk masyarakat. Kegiatan investasi merupakan salah satu kegiatan strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dibutuhkan investasi yang besar. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan sangat terbatas, maka pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan salah satunya dengan memberikan kesempatan pada dunia usaha asing atau nasional. Keberadaan investasi swasta sangat penting untuk dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dan diharapkan dapat mengurangi pengangguran.

Investasi swasta yang saat ini bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Blora salah satunya yaitu Mobil Cepu Ltd (MCL). Mobil Cepu Ltd merupakan anak cabang perusahaan dari Exxon Mobil. Perusahaan Exxon Mobil adalah perusahaan milik Amerika yang memiliki beberapa cabang diseluruh dunia. Salah satu cabangnya di Indonesia, perusahaan Exxon Mobil ini fokus untuk memproduksi minyak dan gas bumi. Di Blok Cepu, terdapat Mobil Cepu Ltd yang merupakan anak cabang perusahaan dari Exxon Mobil. Mobil Cepu Ltd sebagai investasi swasta yang terdapat di Kabupaten Blora fokus memproduksi minyak dan gas bumi yang terdapat di Blok Cepu.

Kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Blora dan Mobil Cepu Ltd sebagai investasi swasta dimulai pada tahun 2000, kerjasama ini bertujuan untuk dapat menciptakan kesempatan kerja baru bagi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya migas yang terdapat di Blok Cepu Kabupaten Blora. Mobil Cepu Ltd dalam berinvestasi di Kabupaten Blora masih dalam tahap eksplorasi. Sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan yaitu tenaga kerja yang dapat mendukung kegiatan seismik. Seismik merupakan kegiatan survei yang dilakukan untuk mengetahui kandungan minyak yang terdapat didalam tanah. Pada kegiatan seismik tenaga kerja yang dibutuhkan misalnya: pengukur, pengumpulan data, mendata jika ada bangunan yang rusak dibawah tanah.

Peran investasi swasta dalam proses membuka kesempatan kerja bagi masyarakat dilakukan melalui; untuk mencari tenaga kerja non skill pihak perusahaan memberikan bimbingan kepala desa, agar kepala desa tersebut dapat terkoordinasi sehingga jika terjadi apa-apa rekomendasi dari kepala desa yang digunakan untuk mengamankan daerahnya dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar MCL sehingga masyarakat merasa ikut memiliki. Sedangkan untuk mencari tenaga kerja yang memiliki skill dan semi skill pihak perusahaan memasang pengumuman



lowongan pekerjaan dikoran dan melakukan kerjasama dengan Dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosial setempat tanpa dipungut biaya.

Kerjasama yang dilakukan oleh Mobil Cepu Ltd dengan pemerintah daerah Kabupaten Blora untuk meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat dilakukan apabila ada peluang kerja di perusahaan, maka pihak perusahaan mengunjungi kantor Disnaker dan meminta data tentang tenaga kerja yang sudah diseleksi sebelumnya oleh Dinasker. Sehingga data yang sudah tercatat sebagai tenaga kerja dijadikan acuan oleh perusahaan untuk merekrut tenaga kerja kemudian dilakukan panggilan untuk tenaga kerja yang sesuai spesifikasi perusahaan.

Untuk mendukung peranan dari Mobil Cepu Ltd sebagai investasi swasta dibutuhkan langkah dan strategi agar peranan tersebut dapat tercapai sesuai dengan tujuan. Langkah dan strategi yang dilakukan oleh Mobil Cepu Ltd untuk meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat yaitu melibatkan masyarakat dan kepala desa disekitar wilayah Mobil Cepu Ltd. Karena dukungan dari berbagai pihak sangat penting demi tujuan yang akan dicapai yaitu untuk meningkatkan lapangan kerja.

Selain kesempatan kerja yang disediakan oleh Mobil Cepu Ltd, keberadaan disekitar wilayah Mobil Cepu Ltd juga dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Blora untuk dijadikan bisnis sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lainnya. Misalnya dengan adanya perusahaan Mobil Cepu Ltd yang berfokus memproduksi minyak dan gas, membawa daya tarik tersendiri oleh semua orang. Sehingga banyak pendatang yang entah ingin bekerja di perusahaan Mobil Cepu Ltd tersebut, atau sebagai klien dari perusahaan Mobil Cepu Ltd. Dengan keadaan yang seperti demikian sehingga dibutuhkan tempat tinggal, tempat untuk makan dan istirahat, serta tempat – tempat untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Untuk memenuhi keadaan tersebut sekarang ini banyak dibangun berbagai fasilitas di sekitar wilayah perusahaan Mobil Cepu Ltd mulai fasilitas perumahan, perhotelan, restaurant dan toko-toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari.

Dengan dimanfaatkannya kesempatan tersebut oleh masyarakat disekitar Mobil Cepu Ltd, berdampak baik dalam penciptaan lapangan kerja baru. Sehingga akan semakin banyak tersedia peluang atau kesempatan kerja bagi masyarakat. Selain itu perekonomian di Kabupaten Blora secara otomatis akan semakin meluas dan berkembang pula dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora akan meningkat seiring dengan peningkatan lapangan kerja yang banyak tersedia di Kabupaten Blora.

### **3. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta Dalam Melaksanakan Peranannya Untuk Meningkatkan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat**

Masalah yang paling utama dihadapi oleh daerah secara garis besar yaitu masalah ketersediaan lapangan kerja dan pengangguran. Begitu pula masalah yang terdapat di Kabupaten Blora saat ini. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dibutuhkan

kerjasama antara pemerintah daerah, investasi swasta dan masyarakat. Penciptaan kesempatan kerja baru belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran seperti yang diharapkan. Karena seiring pelaksanaan peran dari pemerintah daerah dan investasi swasta untuk meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan terdapat beberapa masalah dan kendala yang harus dihadapi. Dan kendala tersebut harus segera diatasi dan diselesaikan agar pemerintah daerah dan investasi swasta dapat menjalankan peranannya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

### **3.1. Pemerintah Daerah**

Dalam melaksanakan peranannya untuk meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat, pemerintah daerah mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan peran tersebut. Kendala tersebut menjadi penghambat kinerja pemerintah untuk meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah yaitu: terdapat keterbatasan dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Blora sendiri. Dengan adanya masalah keterbatasan dana tersebut menjadikan penghambat oleh pemerintah daerah untuk dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Keterbatasan dana yang dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Blora disebabkan karena adanya penetapan kebijakan otonomi daerah sekarang ini. Kebijakan otonomi daerah dipandang bahwa dalam melaksanakan semua kegiatan di daerah harus menggunakan dana asli pendapatan daerah tersebut tanpa adanya campur tangan lagi dari pemerintah pusat. Keadaan seperti ini mengakibatkan keterbatasan dana sehingga menjadi penghambat pemerintah daerah dalam melaksanakan peranannya dalam meningkatkan lapangan kerja.

Kendala lainnya yaitu ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja, Keadaan yang seperti demikian seringkali menjadi masalah yang menghambat dalam perekonomian karena dengan adanya ketidakseimbangan antara pencari kerja dan jumlah lapangan pekerjaan. Akan mengakibatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat menjadi berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga merupakan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Blora. Rendahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat di Kabupaten Blora disebabkan karena keberadaan fasilitas tingkat pendidikan angkatan kerja yang tersedia di Kabupaten Blora masih relatif rendah dan minimnya pusat pelatihan ketrampilan yang terdapat di Kabupaten Blora. Sehingga kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja diberbagai sektor perekonomian yang terdapat di Kabupaten Blora.

Penyebab munculnya kendala tersebut dikarenakan peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak dibarengi dengan perluasan lapangan kerja atau kapasitas produksi, akibatnya jumlah pengangguran pun ikut meningkat seiring dengan

peningkatan jumlah angkatan kerja. Selain itu, masih rendahnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora juga menjadi kendala yang dihadapi oleh pemerintah untuk meningkatkan lapangan kerja. Rendahnya kesejahteraan masyarakat dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator dari tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu dilihat dari tingkat pendidikan, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Sedangkan kalau dilihat dari tingkat kesehatan dipandang sebagai rendahnya mutu kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Selain itu, jika dilihat dari tingkat ekonomi disebabkan karena kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi yang rendah dan kurangnya ketrampilan yang dimiliki oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Blora.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Blora dalam meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat, pemerintah daerah melaksanakan berbagai upaya, diantaranya: diantaranya yaitu, meningkatkan program pendidikan dan pelatihan kerja guna meningkatkan keterampilan dan keahlian calon pekerja. Seperti menyediakan sarana dan prasarana lembaga-lembaga pelatihan, seperti Balai Latihan Kerja (BLK) dan Kursus Latihan Kerja (KLK), kursus menjahit, pelatihan membuat kerajinan tangan yang didirikan di daerah Kabupaten Blora

### **3.2. Investasi Swasta**

Investasi swasta juga memiliki andil dalam upaya peningkatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di suatu daerah, terutama peran investasi swasta yaitu dengan investasinya yang bertujuan untuk membuka kesempatan kerja dan lapangan kerja bagi masyarakat. Dalam menjalankan perannya tersebut investasi swasta juga mengalami kendala diantaranya yaitu sebagai berikut, pada waktu melaksanakan perekrutan karyawan yang mendaftar tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Karena bidang migas merupakan jenis pekerjaan yang padat investasi, padat teknologi dan padat resiko dan yang jelas bukan padat karya. Padat resiko karena di migas dalam proses bekerja menggunakan alat berat, konstruktif, dll. Sehingga para pekerja harus memiliki bakat teknis, hal ini dibutuhkan training yang cukup dan pengalaman kerja karena kedua hal tersebut sangat penting. Pihak perusahaan tidak menginginkan kalau ada karyawan yang terluka disebabkan kurang training dan kurang pengalaman dalam bekerja.

Penyebab munculnya kendala tersebut karena jumlah kesempatan kerja dan lapangan kerja yang tersedia di Mobil Cepu Ltd dengan jumlah pencari kerja yang ada di Kabupaten Blora tidak seimbang. Sehingga kondisi yang seperti demikian memunculkan keinginan pada masyarakat yang setiap melamar ke Perusahaan Mobil Cepu Ltd harus dapat diterima semua. Hal tersebut tidak mungkin bisa dilakukan oleh Mobil Cepu Ltd karena sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang migas, Mobil Cepu Ltd memiliki keterbatasan dalam perekrutan jumlah karyawan.

Untuk mengantisipasi berbagai kendala yang dihadapi oleh Mobil Cepu Ltd sebagai investasi swasta dalam melaksanakan peranannya untuk meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Blora Pihak perusahaan Mobil Cepu Ltd sebagai investor swasta melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Blora yang terus berupaya melakukan ekspektasi yang berguna untuk *manage* masyarakat. Agar seluruh masyarakat Kabupaten Blora dapat menyadari kalau jenis pekerjaan di bidang migas merupakan jenis pekerjaan yang padat teknologi bukan jenis pekerjaan yang padat karya.

## **PENUTUP**

Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan lapangan kerja masyarakat Kabupaten Blora sejauh ini sudah cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Peran dan upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan lapangan kerja dapat dilihat dari pelaksanaan program – program kemasyarakatan yang sifatnya dapat memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat diantaranya melalui: Penyelenggaraan kursus-kursus ketrampilan bagi masyarakat atau pencari kerja yang berguna untuk meningkatkan kualitas SDM, Mendirikan berbagai macam usaha milik daerah (Perusda), Membantu dan mendorong kewirausahaan, Melakukan perpindahan penduduk antar pulau (Transmigrasi), Menyediakan informasi dan menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan, Menyelenggarakan pelatihan ketrampilan peningkatan produktifitas masyarakat perdesaan. Selain itu pemerintah daerah Kabupaten Blora juga melakukan kerjasama dengan investasi swasta (Mobil Cepu Ltd) dengan cara memberikan peluang kepada investor swasta untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Blora dengan mempermudah perijinan pendirian usaha, menyediakan fasilitas-fasilitas yang nyaman sesuai yang dibutuhkan oleh investor serta melaksanakan pengawasan secara maksimal. Mepipun demikian, peran dari pemerintah daerah harus terus ditingkatkan demi pencapaian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora.

Peran Investasi swasta (Mobil Cepu Ltd) dalam meningkatkan lapangan kerja masyarakat Kabupaten Blora sudah cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Peran dari Mobil Cepu Ltd dapat dilihat dari kerjasama yang dibangun dengan Dinas Tenaga Kerja setempat serta melibatkan secara langsung masyarakat dan kepala desa yang terdapat di wilayah sekitar Mobil Cepu Ltd. Hal tersebut dilakukan bertujuan apabila perusahaan Mobil Cepu Ltd terdapat lowongan pekerjaan, pihak perusahaan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga kerja dan kepala desa setempat untuk disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Blora. Selain itu, keberadaan perusahaan Mobil Cepu Ltd dinilai masyarakat sangat penting. Karena wilayah disekitar perusahaan Mobil Cepu Ltd banyak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai area perekonomian.

Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat antara lain kurang tersedianya dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sendiri, jumlah pencari kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja dan masih rendahnya SDM di sebagian masyarakat yang terdapat di Kabupaten Blora serta lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap kinerja investasi swasta selama menjalankan usahanya di Kabupaten Blora. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Mobil Cepu Ltd sebagai investasi swasta yaitu Karyawan yang akan direkrut mayoritas tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan ketimpangan dalam proses perekrutan karyawan. Selain itu jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang disediakan oleh perusahaan tidak sebanding sehingga mengakibatkan keinginan dari setiap masyarakat yang melamar ke Mobil cepu Ltd harus dapat diterima semua, sedangkan pihak perusahaan memiliki keterbatasan dalam perekrutan karyawan. Karena Mobil cepu Ltd dalam melaksanakan proses perekrutan karyawan didasarkan oleh spesifikasi yang khusus.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ciptoheriyanto, Priyono. 2000. *Sumber Daya Manusia, Kesempatan Kerja dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LPFE UI.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: PT.Bumi Aksara.
- Haris, Syamsudin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hanif, Nurcholis. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lincoln, Arsyad. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE-YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Ekonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Roda Karya.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik: Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Rachbini, Didik. 2004. *Ekonomi Politik (Kebijakan dan Strategi Pembangunan)*. Jakarta: Granit.
- S, Pamudji . 1985. *Kerja Sama Antar Daerah dalam Rangka Membina Wilayah*, Bandung: Bumi Aksara.
- Singarimbun, Masri dkk. 2006. *Metode Penelitian Surve (Cetakan Ke 18)* . Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Rajawali.
- Sumawinata, Sarbini. 2004. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Syarifin, Pipin. 2006. *Pemerintah Daerah Di Indonesia (Dilengkapi UU No.32 Tahun 2004)*. Bandung: Pustaka Setia.

Todaro & Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi (Sebuah Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.

Zainal Said. 2008. *Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Dan Ekonomi Politik*. Jakarta: Suara bebas.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Blok\\_Cepu](http://id.wikipedia.org/wiki/Blok_Cepu), diakses 15 September 2011

<http://exxonmobil.com>, diakses 10 Mei 2012

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi